



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah dan Penentuan Isu Strategis

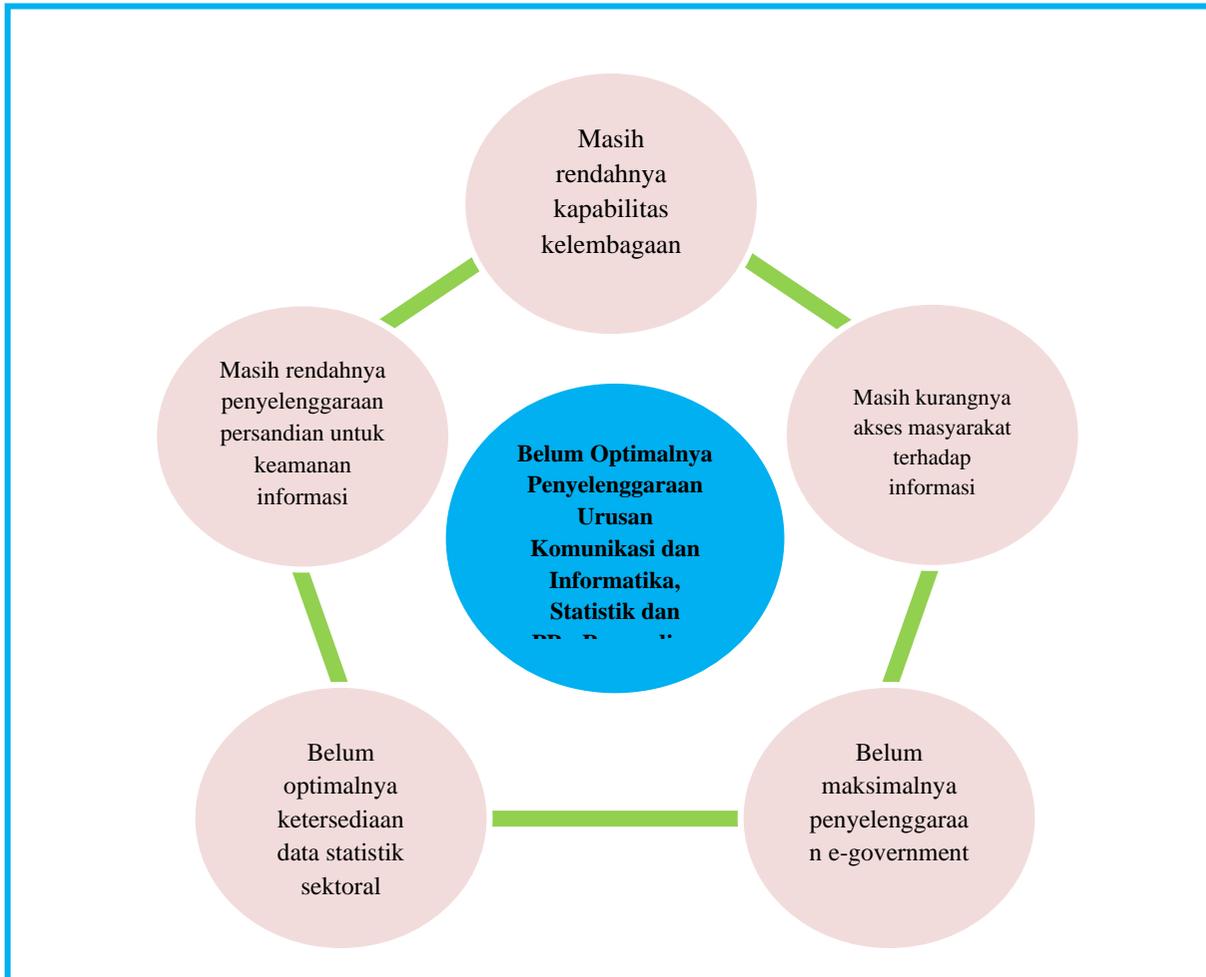
Permasalahan pembangunan daerah umumnya disebabkan oleh faktor kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan pembangunan daerah ini disebut sebagai "gap expectation" antara kinerja pembangunan yang ingin dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu menyelenggarakan tiga urusan wajib non pelayanan dasar, yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian, dan urusan statistik. Berdasarkan hasil analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja masa lalu, dapat dirumuskan permasalahan pokok Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu yaitu : "Belum Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian". Permasalahan pokok tersebut diidentifikasi dengan melihat bahwa penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian belum terlaksana dengan baik atau dengan kata lain capaian kinerja yang diharapkan belum tercapai. Permasalah pokok tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan yaitu :

1. Masih rendahnya kapabilitas kelembagaan,
2. Masih kurangnya akses masyarakat terhadap informasi,
3. Belum maksimalnya penyelenggaraan e-government,
4. Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral,
5. Masih rendahnya penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi.

Keterkaitan antara permasalahan pokok pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu dengan permasalahan yang menyebabkan, tergambar dalam mata rantai sebagaimana gambar 3.1 berikut :



Gambar 3.1
Mata Rantai Permasalahan Pokok Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu

Diharapkan rangkaian permasalahan tersebut di atas akan menjadi sebuah kerangka dasar dalam penentuan perencanaan kebijakan ke depan yang disempurnakan oleh hasil evaluasi periode sebelumnya beserta kajian-kajian yang terkait. Selanjutnya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut harus diminimalisir dengan mengetahui permasalahan yang lebih spesifik (akar masalah) yang membebani pencapaian tujuan dan sasaran



perangkat daerah. Sehubungan dengan itu dilakukan identifikasi terhadap akar masalah sebagaimana terurai dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu

Permasalahan	Akar Masalah
Masih rendahnya kapabilitas kelembagaan	Belum maksimalnya ketersediaan sumber daya, baik SDM maupun sarana dan prasarana
Masih kurangnya akses masyarakat terhadap informasi	Belum baiknya tata kelola dan penatausahaan PPID
	Masih kurangnya pelibatan masyarakat (KIM) dalam diseminasi informasi
	Belum maksimalnya hasil kerja tim media center
Belum maksimalnya penyelenggaraan e-government	Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur penyelenggaraan pelayanan e-government
Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral	Kurangnya pemahaman aparatur dibidang statistik sektoral
Masih rendahnya penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi	Belum maksimalnya ketersediaan sumber daya, baik aparatur yang memiliki kualifikasi sandi, tempat kegiatan persandian dan peralatan persandian

Rumusan akar masalah yang telah diidentifikasi selanjutnya dianalisis sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Belum maksimalnya ketersediaan sumber daya, baik SDM maupun sarana dan prasarana

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu mengalami kekurangan sumber daya, baik SDM maupun sarana dan prasarana. Dari segi SDM, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu masih kekurangan Pegawai PNS sebanyak 26 orang sedangkan dari segi sarana dan prasarana masih sangat kurang, khususnya sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung teknis kegiatan diseminasi informasi.



2. Belum baiknya tata kelola dan penatausahaan PPID
Tata kelola dan penatausahaan PPID belum berjalan sebagaimana mestinya disebabkan karena kelembagaan PPID baru dibentuk pada tahun 2018 sehingga penyelenggaraan kegiatan belum maksimal. Terkait dengan hal ini pada periode pembangunan ke depan mulai difokuskan pada peningkatan tugas dan fungsi PPID.
3. Masih kurangnya pelibatan masyarakat (KIM) dalam diseminasi informasi
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai salah satu partner pemerintah dalam diseminasi informasi belum terbentuk di Kabupaten Luwu. Oleh karena itu untuk periode ke depan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu akan memfokuskan pada pembentukan KIM pada tingkat kecamatan.
4. Belum maksimalnya hasil kerja tim media center
Hasil kerja Tim Media Center belum maksimal dikarenakan sarana dan prasarana yang ada belum mendukung. Oleh karena itu untuk periode ke depan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu akan memfokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan-pelatihan teknis.
5. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur penyelenggaraan pelayanan e-government
Infrastruktur pendukung pelayanan e-government yang ada saat ini belum memadai. Infrastruktur yang masih kurang antara lain jaringan ke perangkat daerah yang belum terbangun secara keseluruhan. Oleh karena itu ke depan pemenuhan ketersediaan infrastruktur menjadi prioritas.
6. Kurangnya pemahaman aparatur dibidang statistik sektoral
Statistik sektoral adalah salah satu urusan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu. Dalam hal penyediaan data statistik sektoral belum terlaksana dengan baik karena sumber daya aparatur yang melaksanakan tugas ini belum terpenuhi baik kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu ke depan peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur yang menangani statistik sektoral menjadi fokus perhatian selain penyediaan data.
7. Belum maksimalnya ketersediaan sumber daya, baik aparatur yang memiliki kualifikasi sandi, tempat kegiatan persandian dan peralatan persandian
Bidang Persandian Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu mengalami kekurangan sumber daya, baik SDM maupun sarana dan prasarana.



Dari segi SDM, Aparatur yang memiliki pemahaman dalam hal persandian untuk pengamanan informasi masih sangat kurang. Selain itu tempat kegiatan persandian dan peralatan persandian yang ada masih jauh dari standar yang seharusnya. Sehingga untuk periode ke depan urusan persandian difokuskan pada peningkatan sumber daya.



3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil review terhadap gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara dan Badan Pusat Statistik, implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah, dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah, dirumuskan isu strategis dalam pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu.

Analisis isu-isu strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu untuk perencanaan jangka menengah daerah kurun waktu 2025-2026 diidentifikasi melalui serangkaian proses. Dimulai dari identifikasi permasalahan menurut bidang, analisis lingkungan strategis, kemudian diperoleh daftar calon isu strategis. Selanjutnya dilakukan penilaian, dihasilkan daftar isu strategis sebagai berikut :

- a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM dalam bidang persandian, statistik dan teknologi informatika.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan pelayanan publik.
- c. Belum tersedianya regulasi/kebijakan daerah guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang persandian, statistik dan komunikasi informasi publik.
- d. Belum optimalnya pelayanan e-Government.
- e. Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan data statistik sektoral dalam mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan.
- f. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan data/informasi pemerintah daerah belum layak/belum optimal.
- g. Belum optimalnya kinerja pelayanan komunikasi dan informasi.
- h. Belum optimalnya perangkat daerah yang telah menggunakan jaring komunikasi sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah.
- i. Kurangnya pemahaman perangkat daerah dan masyarakat akan arti pentingnya data serta pengamanan data dan informasi.